

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil analisis deskriptif memberikan gambaran rata-rata skor untuk persepsi populasi (ps-p/5) variabel Kualitas Pengelola, Kualitas Auditor Internal dan Pengawasan Legislatif serta Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Flores Timur adalah baik.
2. Variabel Kualitas Pengelola secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Flores Timur. Variabel Kualitas Auditor Internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Flores Timur. Variabel Pengawasan Legislatif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Flores Timur. dan variabel Kualitas Pengelola, Kualitas Auditor Internal dan Pengawasan Legislatif secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Flores Timur.
3. Hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah 49,6% terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Flores Timur, merupakan kontribusi dari 3 (tiga) variabel bebas yaitu Kualitas Pengelola, Kualitas Auditor Internal dan Pengawasan legislatif.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian, hasil pembahasan dan kesimpulan maka saran dari penulis yang dapat diberikan yaitu:

1. Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, hendaknya tetap mempertahankan Kualitas dari Pengelola, Kualitas Auditor Internal, Pengawasan Legislatif, agar bekerja secara efektif dan efisien dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, pengauditan laporan keuangan dan pengawasan anggaran, guna terciptanya kualitas dari laporan keuangan.
2. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, disarankan agar selalu aktif menerapkan sistem pengendalian internal agar cepat menindaklanjuti setiap hasil temuan/riviu maupun saran yang diberikan oleh BKP/Inspektorat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur diharapkan untuk para anggota DPRD kiranya memahami mengenai anggaran dalam penyusunan APBD dan para DPRD harus mampu menetapkan prioritas anggaran yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvian. 2006 *Auditing Dan Pelayanan Verifikasi Pendekatan Terpadu*. Jakarta: PT. Indeks
- Arens, Alvian. 2006 *Auditing Dan jasa assurance*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2007. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI
- Christiawan. 2002 *Komite Standar Akuntansi Keuangan Persyaratan Independensi Auditor*, Jakarta: Cakrawala Akuntansi.
- Dharmawati tuti 2007. *Pengaruh Kualitas Auditor Terhadap Temuan Audit Dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sebagai Variable Entervening*.
- Efendy, Mull. Taufik, 2010, *Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah* (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)
- Halim, Abdul. 2003. *Auditing I (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Institusi Akuntan Publik Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Malik, M.B. dan huberman. 2008 *fungsi pengawasan dewan perwakilan daerah: antara pengawasan politik dan maneuver politik*
- Silaban, pesaman. 2009. *Kinerja Eksekutif Dan Legislatif Dalam Proses Penganggaran Dan Implikasinya Terhadap Perwujudan Good Governance*. Jurnal Legislatif April 2011.
- Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 2008. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008*. Jakarta
- Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Alfabeta
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor*

17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.* Jakarta: Pemerintah Indonesia,

www.BPK-Rl.go.id (Tanggal Akses 13 Juni 1019)